

REKONSTRUKSI ZONASI PENDIDIKAN DASAR DAN LAYANAN INKLUSIF MELALUI TATA KELOLA BERBASIS DATA

Qoriah Rahmawati¹, Fadlullah²

¹Program Doktorat Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[1qoriahrahmawatiridho@gmail.com](mailto:qoriahrahmawatiridho@gmail.com), [2fadlullah@untirta.ac.id](mailto:fadlullah@untirta.ac.id)

ABSTRACT

Primary school zoning policy has been implemented as a strategy to reduce disparities in educational access through a geographically based approach. However, previous studies indicate that equal access does not automatically lead to educational equity, particularly when school quality, resource distribution, and institutional readiness remain uneven across regions. At the same time, inclusive education emphasizes the importance of addressing the diverse learning needs of students, yet its implementation is often disconnected from zoning policy. This study aims to reconstruct primary education zoning policy through an integrative approach that connects spatial distribution, school capacity, and student needs within a data-driven governance framework. The study employed a conceptual research design using literature synthesis and critical analysis of educational policies. The findings resulted in the development of the Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM), which consists of four interconnected components: zoning policy design, inclusive capacity, adaptive school management, and data-driven governance. The study reveals that the main challenge of zoning implementation lies not in the policy concept itself, but in fragmented implementation that fails to integrate access, quality, and inclusion in a systemic manner. The main contribution of this study is the development of a data-driven educational governance model that links equitable access, inclusive education, and quality improvement within a coherent and sustainable framework for primary education.

Keywords: primary education zoning, inclusive education, educational equity, data-driven governance, school management

ABSTRAK

Kebijakan zonasi pendidikan dasar diterapkan sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan akses antar sekolah melalui pendekatan berbasis wilayah. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pemerataan akses pada jenjang pendidikan dasar belum secara otomatis menghasilkan keadilan pendidikan, terutama ketika kualitas sekolah, distribusi sumber daya, dan kesiapan institusi dalam memberikan layanan inklusif masih belum merata. Di sisi lain, layanan inklusif pada pendidikan dasar menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, tetapi implementasinya sering berjalan terpisah dari kebijakan zonasi. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kebijakan zonasi pendidikan dasar melalui pendekatan integratif yang menghubungkan distribusi spasial peserta didik, kapasitas sekolah, dan kebutuhan belajar peserta didik berbasis sistem data terintegrasi. Penelitian menggunakan metode studi konseptual melalui sintesis literatur dan analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan. Hasil penelitian

menghasilkan Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM) yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu desain zonasi, kapasitas inklusif, manajemen sekolah adaptif, dan tata kelola berbasis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama implementasi zonasi pendidikan dasar bukan terletak pada konsep kebijakannya, melainkan pada fragmentasi pelaksanaan yang belum mengintegrasikan aspek akses, kualitas, dan inklusi secara sistemik. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model tata kelola pendidikan berbasis data yang menghubungkan pemerataan akses, layanan inklusif, dan peningkatan mutu pendidikan dasar dalam satu kerangka yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: zonasi pendidikan dasar, layanan inklusif, keadilan pendidikan, tata kelola berbasis data, manajemen sekolah

A. Pendahuluan

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu agenda utama pembangunan pendidikan global (UNESCO, 2020; UNESCO, 2023). Pada jenjang pendidikan dasar, pemerataan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga dengan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, perbedaan kualitas sekolah, distribusi guru, ketersediaan sarana pembelajaran, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Dengan demikian, pemerataan akses belum selalu diikuti oleh pemerataan kualitas layanan.

Di Indonesia, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dikembangkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan melalui pendekatan berbasis wilayah. Pada pendidikan dasar, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsentrasi peserta didik pada sekolah tertentu serta mendorong pemerataan layanan antarwilayah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan kualitas sekolah, distribusi sumber daya yang belum merata, dan perbedaan kapasitas satuan pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang optimal (Andari et al., 2020; Ananda et al., 2024).

Pada saat yang sama, pendidikan inklusif semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan yang menghargai keberagaman peserta didik dan

menjamin hak belajar bagi semua anak tanpa diskriminasi (Kim et al., 2024). Dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan inklusif masih menghadapi keterbatasan kompetensi guru, fasilitas pendukung, dan dukungan kelembagaan (Rasmitadila et al., 2023; Somad et al., 2023).

Persoalan muncul ketika kebijakan zonasi dan layanan inklusif berjalan secara terpisah. Zonasi berorientasi pada distribusi peserta didik berdasarkan wilayah, sedangkan pendidikan inklusif berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar yang beragam. Akibatnya, upaya pemerataan sering berhenti pada aspek akses dan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kualitas layanan serta kesiapan sekolah dalam melayani keberagaman peserta didik (Hardy & Woodcock, 2023).

Selain itu, transformasi digital mendorong pentingnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pendidikan. Namun, data pendidikan, kependudukan, dan sosial-ekonomi masih tersebar pada berbagai sistem yang belum terintegrasi. Padahal, integrasi data dapat membantu pemerintah dan sekolah memahami kebutuhan peserta didik, kapasitas

sekolah, dan karakteristik wilayah secara lebih akurat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran (Guan et al., 2024; World Bank, 2021).

Meskipun penelitian mengenai zonasi, pendidikan inklusif, dan tata kelola berbasis data telah banyak dilakukan, kajian yang menghubungkan ketiganya dalam konteks pendidikan dasar masih terbatas. Sebagian besar studi menempatkan zonasi sebagai instrumen pemerataan akses, sedangkan layanan inklusif dan pemanfaatan data dikaji secara terpisah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam memahami bagaimana akses, kualitas layanan, dan keberagaman kebutuhan peserta didik dapat diintegrasikan dalam satu kerangka tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan **Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM)** yang menghubungkan distribusi spasial peserta didik, kapasitas layanan inklusif, manajemen sekolah adaptif, dan tata kelola berbasis data sebagai landasan bagi kebijakan pendidikan dasar yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan Pustaka

Zonasi Pendidikan Dasar dan Keadilan Pendidikan

Kebijakan zonasi dikembangkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan melalui pendekatan berbasis wilayah. Pada Pendidikan dasar, kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses antar satuan pendidikan dan mendorong distribusi peserta didik yang lebih proporsional.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerataan akses belum tentu menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan (Ariska et al., 2024; Prasetyaningtyas et al., 2024). Perbedaan kualitas guru, sarana pembelajaran, dukungan akademik, dan kapasitas sekolah masih memengaruhi pengalaman belajar peserta didik (OECD, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan zonasi perlu diukur tidak hanya dari distribusi peserta didik, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan pendidikan.

Konsep *educational equity* menegaskan bahwa setiap peserta didik memerlukan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya untuk mencapai hasil belajar yang optimal

(Ainscow, 2020). Dalam perspektif ini, zonasi perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pemerataan akses dan mutu pendidikan secara bersamaan.

Layanan Inklusif pada Pendidikan Dasar

Pendidikan inklusif menempatkan keberagaman peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa seluruh peserta didik memiliki hak yang sama untuk belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangannya (Booth & Ainscow, 2021).

Dalam pendidikan dasar, layanan inklusif tidak hanya berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga kemampuan sekolah mengakomodasi keragaman kemampuan akademik, latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, dan karakteristik individu. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, kurikulum, sarana pembelajaran, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan (Rasmitadila et al., 2023).

Meskipun demikian, layanan inklusif masih sering berjalan terpisah dari kebijakan pemerataan akses. Akibatnya, distribusi peserta didik melalui zonasi belum selalu mempertimbangkan kapasitas sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara zonasi dan layanan inklusif.

Tata Kelola Pendidikan Berbasis Data

Perkembangan tata kelola pendidikan modern menempatkan data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan *data-driven governance* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan kebutuhan peserta didik, kapasitas sekolah, kondisi wilayah, dan efektivitas program pendidikan (Guan et al., 2024).

Namun, data kependudukan, pendidikan, dan sosial-ekonomi masih sering berada dalam sistem yang terpisah sehingga belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, integrasi data merupakan prasyarat penting bagi pengembangan kebijakan berbasis

bukti (*evidence-based policy*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan (World Bank, 2021).

Dalam pendidikan dasar, tata kelola berbasis data memungkinkan identifikasi yang lebih tepat mengenai distribusi peserta didik, kebutuhan layanan inklusif, dan kapasitas sekolah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung pemerataan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kajian pustaka menunjukkan bahwa zonasi, layanan inklusif, dan tata kelola berbasis data memiliki keterkaitan yang kuat dalam mendukung keadilan pendidikan. Zonasi berfungsi memperluas akses, layanan inklusif memastikan terpenuhinya kebutuhan belajar yang beragam, sedangkan tata kelola berbasis data menyediakan dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Namun, penelitian sebelumnya umumnya masih membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan zonasi, layanan inklusif, dan tata kelola berbasis

data dalam satu kerangka tata kelola pendidikan yang komprehensif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan **Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM)** sebagai model yang menghubungkan pemerataan akses, kapasitas layanan inklusif, manajemen sekolah adaptif, dan pemanfaatan data dalam satu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual (conceptual research) melalui sintesis literatur dan analisis kebijakan pendidikan. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan zonasi pendidikan dasar, layanan inklusif, dan tata kelola pendidikan berbasis data. Melalui pendekatan tersebut, penelitian mengidentifikasi kesenjangan literatur, mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis, serta merumuskan model tata kelola pendidikan yang lebih komprehensif dan adaptif.

Penelitian dilaksanakan pada Januari–Mei 2026 dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, dokumen kebijakan pendidikan, laporan penelitian, serta publikasi akademik yang relevan. Literatur diprioritaskan dari publikasi tahun 2020–2025 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran kajian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, kontribusi konseptual, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Prosedur penelitian meliputi empat tahap, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur terkait zonasi pendidikan dasar, layanan inklusif, manajemen satuan pendidikan, dan tata kelola berbasis data; (2) analisis kritis terhadap temuan penelitian dan kebijakan pendidikan; (3) identifikasi kesenjangan konseptual dan tantangan implementasi; serta (4) sintesis konsep untuk mengembangkan **Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM)** yang mengintegrasikan desain zonasi, kapasitas inklusif, manajemen

sekolah adaptif, dan tata kelola berbasis data.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan matriks analisis literatur untuk memetakan tema utama, temuan penelitian, kesenjangan konseptual, dan kontribusi masing-masing sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi, kategorisasi, komparasi, dan sintesis konsep mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) serta Sugiyono (2022). Proses analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola dan permasalahan implementasi kebijakan zonasi serta layanan inklusif, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kerangka konseptual yang menghasilkan IIZMM sebagai model tata kelola pendidikan yang menghubungkan dimensi akses, kualitas, dan inklusi secara sistemik serta berpotensi menjadi landasan bagi penelitian empiris selanjutnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil sintesis literatur dan analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi dan layanan inklusif pada pendidikan dasar masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun zonasi dirancang untuk memperluas pemerataan akses pendidikan berbasis wilayah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerataan akses belum selalu diikuti oleh pemerataan mutu karena masih terdapat perbedaan kapasitas satuan pendidikan, kualitas guru, fasilitas pembelajaran, dan dukungan layanan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan konsep educational equity yang menegaskan bahwa akses yang setara perlu didukung oleh distribusi sumber daya dan kualitas layanan yang lebih merata.

Pada saat yang sama, layanan inklusif berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan keberagaman peserta didik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, implementasinya masih cenderung berfokus pada layanan individual dan belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan distribusi peserta didik berbasis wilayah. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan akses, mutu pendidikan, dan layanan inklusif.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan *Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM)*, yaitu model konseptual yang mengintegrasikan dimensi akses, kualitas, inklusi, dan tata kelola berbasis data dalam satu kerangka yang sistemik dan saling terhubung.

**Tabel 1 Sintesis Literatur,
Kelemahan, dan Kontribusi Penelitian**

Dimensi	Temuan Utama Literatur	Kelemahan	Kontribusi Penelitian Ini
Kebijakan Zonasi	Meningkatkan pemerataan akses berbasis wilayah	Tidak menjamin kualitas pendidikan	Mengintegrasikan dimensi kualitas satuan pendidikan dasar
Keadilan Pendidikan	Fokus pada distribusi akses	Belum menyentuh pengalaman belajar peserta didik	Memperluas konsep keadilan berbasis kebutuhan
Layanan Inklusif pada Pendidikan Dasar	Menekankan keberagaman peserta didik	Tidak terhubung dengan kebijakan spasial	Menghubungkan inklusi dengan zonasi
Implementasi Kebijakan	Bersifat sektoral dan parsial	Kurang koordinasi antar sistem	Menawarkan model tata kelola yang lebih sistemik
Tata Kelola Data	Digunakan untuk perencanaan pendidikan	Belum terintegrasi antar sistem	Mengembangkan tata kelola berbasis data terpadu

Sumber: Hasil sintesis peneliti (2026)

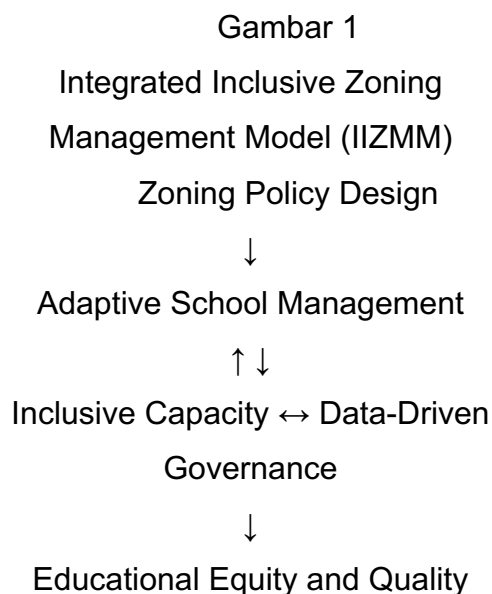
Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar

penelitian sebelumnya masih membahas zonasi, layanan inklusif, dan tata kelola pendidikan secara terpisah. Penelitian ini berupaya mengatasi keterbatasan tersebut melalui pengembangan model yang mengintegrasikan seluruh komponen dalam satu kerangka konseptual.

Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM)

Model IIZMM terdiri atas empat komponen utama yang saling berhubungan, yaitu:

1. *Zoning Policy Design*, yaitu perancangan distribusi peserta didik berbasis wilayah dan data demografis.
2. *Inclusive Capacity*, yaitu kesiapan satuan pendidikan dasar dalam melayani keberagaman peserta didik melalui dukungan guru, fasilitas, dan kurikulum.
3. *Adaptive School Management*, yaitu kemampuan satuan pendidikan dasar merespons perubahan kebutuhan peserta didik secara fleksibel.
4. *Data-Driven Governance*, yaitu pemanfaatan data lintas sistem sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan yang lebih akurat.



Sumber: Dikembangkan peneliti (2026)

Gambar 1 menunjukkan bahwa distribusi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kedekatan geografis, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas satuan pendidikan dasar dan kebutuhan peserta didik. Tata kelola berbasis data berperan sebagai mekanisme integrasi yang menghubungkan seluruh komponen sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih adaptif dan berbasis bukti.

Tabel 2 Komponen Model IIZMM dan Fungsi Operasional

Komponen Model	Deskripsi	Fungsi Utama	Dampak yang Diharapkan
Zoning Policy Design	Distribusi peserta didik berbasis wilayah	Pemerataan akses pendidikan	Mengurangi ketimpangan spasial

Inclusive Capacity	Kesiapan guru, fasilitas, dan kurikulum	Mendukung keberagaman peserta didik	Meningkatkan partisipasi inklusif
Adaptive School Management	Manajemen satuan pendidikan dasar yang responsif dan fleksibel	Penyesuaian kebutuhan peserta didik	Meningkatkan kualitas pembelajaran
Data-Driven Governance	Integrasi berbagai sumber data pendidikan	Dasar pengambilan keputusan	Kebijakan lebih akurat dan berkelanjutan

Sumber: Dikembangkan peneliti (2026)

Tabel 3 Operasionalisasi Model IIZMM

Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Pengukuran
Zonasi	Jarak satuan pendidikan dasar dan kepadatan peserta didik	GIS, Dapodik	Analisis spasial
Kapasitas Inklusif	Rasio guru dan pelatihan layanan inklusif	Data satuan pendidikan dasar	Skala indeks
Manajemen Adaptif	Program diferensiasi dan layanan sekolah	Dokumen satuan pendidikan dasar	Analisis kualitatif
Tata Kelola Data	Tingkat integrasi sistem data	Sistem pemerintah	Audit sistem

Sumber: Dikembangkan peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa model IIZMM dapat dioperasionalkan menjadi indikator yang terukur sehingga berpotensi diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris pada berbagai konteks pendidikan dasar.

D. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam implementasi kebijakan zonasi tidak terletak pada konsep zonasi itu sendiri, melainkan pada lemahnya integrasi antara akses pendidikan, kualitas satuan pendidikan dasar, dan layanan inklusif. Kebijakan zonasi selama ini lebih banyak diarahkan pada distribusi peserta didik berdasarkan wilayah administratif, sedangkan peningkatan kualitas sekolah dan kesiapan layanan inklusif belum memperoleh perhatian yang setara.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keadilan pendidikan tidak cukup diukur dari pemerataan akses semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pengalaman belajar yang diterima peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar, pengalaman belajar yang bermakna menjadi faktor penting karena fase ini merupakan fondasi perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Oleh karena itu, pemerataan akses perlu diiringi dengan pemerataan kualitas layanan pendidikan agar tujuan keadilan pendidikan dapat tercapai secara lebih substantif.

Dalam perspektif layanan inklusif, hasil kajian menunjukkan bahwa keberagaman peserta didik belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan kapasitas satuan pendidikan dasar maupun dalam implementasi kebijakan zonasi. Padahal, layanan inklusif menuntut kesiapan institusi, kompetensi guru, dukungan sarana pembelajaran, serta kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Integrasi antara zonasi dan layanan inklusif menjadi penting agar pemerataan pendidikan tidak hanya terjadi pada aspek akses, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima setiap peserta didik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi persoalan koordinasi antar lembaga dan antar level pemerintahan. Berbagai program pendidikan sering kali berjalan secara sektoral sehingga satuan pendidikan dasar menerima tuntutan kebijakan yang tidak selalu terhubung satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola

dan koordinasi antar sistem (Fullan, 2021).

Pada aspek tata kelola data, hasil analisis menunjukkan bahwa data pendidikan, data kependudukan, dan data sosial-ekonomi masih berada dalam sistem yang berbeda sehingga belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan yang komprehensif. Integrasi data menjadi kebutuhan penting karena memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan peserta didik, kapasitas satuan pendidikan dasar, dan kondisi wilayah yang menjadi sasaran kebijakan.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Integrated Inclusive Zoning Management Model (IIZMM) yang mengintegrasikan desain zonasi, kapasitas inklusif, manajemen sekolah adaptif, dan tata kelola berbasis data dalam satu kerangka konseptual yang saling terhubung. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas setiap komponen secara terpisah, model ini menempatkan tata kelola berbasis data sebagai mekanisme integrasi yang memungkinkan pengambilan

keputusan dilakukan secara lebih responsif, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, model IIZMM memiliki kebermanfaatan kontekstual karena mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan dasar yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi peserta didik, tetapi juga dengan keragaman kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan kebutuhan belajar (Zhao, 2022). Kontribusi utama penelitian ini adalah merekonstruksi zonasi dari sekadar mekanisme administratif menjadi instrumen tata kelola pendidikan berbasis data yang mengintegrasikan pemerataan akses, peningkatan mutu, dan layanan inklusif secara simultan. Dengan demikian, model IIZMM berpotensi menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan dasar yang lebih adil, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi pada pendidikan dasar belum mampu mewujudkan keadilan pendidikan secara optimal bukan karena kelemahan konsep kebijakannya, melainkan karena implementasinya

yang masih berlangsung secara terfragmentasi. Keterhubungan antara pemerataan akses, kualitas pendidikan, dan layanan inklusif belum terbangun secara sistematis sehingga tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara substantif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan zonasi dan layanan inklusif pada pendidikan dasar memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendukung terwujudnya keadilan pendidikan. Zonasi berperan dalam pemerataan akses berbasis wilayah, sedangkan layanan inklusif memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Integrasi kedua dimensi tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman peserta didik.

Penelitian ini menghasilkan *Integrated Inclusive Zoning Management Model* (IIZMM) sebagai model tata kelola pendidikan yang mengintegrasikan desain zonasi, kapasitas inklusif, manajemen satuan pendidikan dasar yang adaptif, dan tata kelola berbasis data dalam satu kerangka sistemik. Keterbaruan

model ini terletak pada upayanya merekonstruksi kebijakan zonasi dari mekanisme administratif menjadi instrumen tata kelola pendidikan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Secara konseptual, model IIZMM memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan pendidikan dengan memperkuat hubungan antara akses, kualitas, dan inklusi dalam satu sistem yang terintegrasi. Secara praktis, model ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan responsif terhadap keragaman kondisi pendidikan dasar di berbagai daerah.

Saran

Penguatan implementasi kebijakan zonasi pada pendidikan dasar perlu diarahkan pada integrasi yang lebih kuat antara pemerataan akses, peningkatan mutu satuan pendidikan, dan layanan inklusif. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu memperkuat pemanfaatan sistem data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dasar dalam melayani

keberagaman kebutuhan peserta didik secara lebih efektif. Penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga model IIZMM yang dikembangkan belum diuji secara empiris dalam konteks implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu melakukan pengujian empiris melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods* untuk menguji validitas, efektivitas, dan implementabilitas model pada berbagai konteks pendidikan dasar. Selain itu, pengembangan instrumen pengukuran berdasarkan indikator operasional IIZMM juga penting dilakukan guna memperkuat penerapan tata kelola pendidikan berbasis data serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat, adaptif, dan berkelanjutan (Miles et al., 2020; Yin, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., Suryadi, A., & Mulyadi, D. (2024). Educational equity and school zoning policy implementation in Indonesia. *Journal of Educational Policy Studies*, 19(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/edupolicy.2024.145678>
- Andari, T., Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2020). Spatial data integration for educational planning and resource allocation. *International Journal of Educational Management*, 34(8), 1245–1260. <https://doi.org/10.1108/IJEM-2020-0124>
- Ariska, N., Sari, M., & Rahman, F. (2024). School zoning policy and educational quality disparities in Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 22–37. <https://doi.org/10.21831/jpkp.v11i1.2024>
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2021). *The index for inclusion: Developing learning and participation in schools* (5th ed.). Centre for Studies on Inclusive Education.
- Fullan, M. (2021). *The right drivers for whole system success*. Corwin Press.
- Guan, T., Li, Y., & Zhao, H. (2024). Data-informed governance and educational equity: Emerging perspectives in educational planning. *Educational Management Administration & Leadership*, 52(1), 45–62. <https://doi.org/10.1177/1741143224123456>
- Hardy, I., & Woodcock, S. (2023). Policy integration and educational reform: Challenges for inclusive systems. *Journal of Education Policy*, 38(4), 611–628.

- <https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2184567>
- Kim, J., McCart, A., & Sailor, W. (2024). Inclusive education and educational justice: Global perspectives and future directions. *International Journal of Inclusive Education*, 28(2), 101–118. <https://doi.org/10.1080/13603116.2024.2234567>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2023). *Equity and inclusion in education: Finding strength through diversity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e9072e21-en>
- Prasetyaningtyas, D., Handayani, E., & Nugroho, A. (2024). Public perceptions toward school zoning policy in Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 31(1), 55–70. <https://doi.org/10.17509/jap.v31i1.2024>
- Rasmitadila, R., Tambunan, A. R. S., & Widyasari, W. (2023). Challenges of inclusive education implementation in Indonesian schools. *International Journal of Instruction*, 16(3), 857–874. <https://doi.org/10.29333/iji.2023.16345a>
- Somad, P., Suyatna, U., & Hidayah, N. (2023). Teacher readiness and inclusive education practices in regular schools. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 19(2), 89–103.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—All means all*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- United Nations. (2022). *Transforming education summit report*. United Nations.
- World Bank. (2021). *Realizing the future of learning: From learning poverty to learning for everyone, everywhere*. World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.
- Zhao, Y. (2022). *Learners without borders: New learning pathways for all students*. Corwin Press.